

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat terbentuk dari beberapa manusia atau golongan manusia yang memiliki cita-cita, wilayah, tujuan yang diikat dengan waktu yang cukup lama serta saling mengadakan hubungan dan perikatan antara satu dengan yang lainnya. Perikatan yang dimaksud adalah perikatan hidup pergaulan yang teratur yang merupakan inti dari suatu kehidupan sosial.

Dengan telah terbentuknya masyarakat sebagaimana digambarkan diatas, maka individu-individu atau manusia-manusia sebagai warga masyarakat agar kepentingan-kepentingannya tetap dapat berlangsung terus maka mereka itu senantiasa memelihara hubungan atau *realitionsip*. Dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa untuk memelihara kelangsungan hidup bermasyarakat agar tetap utuh, harmonis dan berkesinambungan maka sudah seharusnya setiap warga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang besar dan tanggung jawab terhadap masyarakatnya sendiri.

Disamping itu agar keutuhan dan keharmonisan tadi tetap berlangsung serta di lain pihak agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan atau benturan kepentingan antar warga masyarakat maka seharusnya dilengkapi dengan hak-hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hidup yang ada dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu infrastruktur dan suprastruktur untuk menangani

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, salah satu diantaranya yaitu dengan dibentuknya lembaga kemasyarakatan. (A.Susanto, 87:1999).

Lembaga, kelompok maupun organisasi sosial yang ada di masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan sebuah proses. Awal terbentuknya lembaga, kelompok maupun organisasi sosial terjadi karena adanya interaksi sosial individu, antara individu dan kelompok, maupun interaksi sosial antar kelompok. Mereka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama dalam penciptaan lembaga atau kelompok sosial.

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepadan mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah *pranata-sosial*, tetapi *social-institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan (Soekanto;212 :2003)

Perihal norma-norma yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib. Norma-norma tersebut apabila diwujudkan

dalam hubungan antar manusia dinamakan *social-organization* (organisasi sosial). Didalam perkembangan selanjutnya, norma-norma tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok kehidupan manusia. Misalnya kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Kebutuhan akan mata pencaharian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk menyatukan rasa keindahan menimbulkan kesusastraan, seni rupa, seni suara dan lain-lain. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan olah raga, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran dan lain-lain.

Dari contoh-contoh di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Untuk memberi batasan, dapatlah dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Poloma 83: 2004)

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata-kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.

Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata-tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Program / kegiatan apa saja yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui program/kegiatan apa saja yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat kecamatan Rancaekek

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis / ilmiah

Penelitian ini berguna untuk melihat suatu gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat khususnya peranan Ormas Muhammadiyah terhadap masyarakat Kecamatan Rancaekek, supaya menjadi perhatian bersama dan berbagai pihak guna mencari upaya pemecahan masalah ini secara tepat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang peran lembaga masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

E. Kerangka Pemikiran

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi dan para sosiolog telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. (Soekanto 305:2003)

Menurut Mac Iver, perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut.

Gillin dan Gillin menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup perubahan-perubahan; kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun karena adanya penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Secara singkat Samuel Keonig, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab yang intern maupun sebab-sebab ekstern.

Lebih singkat lagi Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menyangkut segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat.

Yang lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial bersifat periodik dan non-periodik.

Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan (*avenue or channel of change*) merupakan saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan mana yang menjadi titik tolak, tergantung pada *cultural focus* masyarakat pada suatu masa yang tertentu.

Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi saluran utama

perubahan sosial. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai suatu sistem sosial.

Merton menjelaskan bahwa analisis struktural-fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Ia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat dijadikan sasaran analisis struktural-fungsional tentu mencerminkan hal yang standar (artinya, terpola, dan berulang). Di dalam pikiran Merton, sasaran tadi struktural fungsional antara lain adalah: peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultur, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. Fungsionalis struktural awal memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. (Ritzer & Goodman; 2004; 138)

Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah wadah sosial Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan bercirikan Islam. Jangkauan anggota organisasi ini secara geografis dan etnis sangat luas, bahkan saat ini Muhammadiyah tidak hanya ada di wilayah Indonesia, tetapi juga terdapat di beberapa negara ASEAN, meskipun hubungannya lebih bersifat aspiratif ketimbang instruktif. (Azra, 1995)

Sejak awal berdirinya organisasi ini telah dikonsentrasikan pada gerakan Islam secara substansial (Ma'arif, 1995:5) dan da'wah amar ma'ruf nahi munkar yang mengandung arti luas yakni mengajak manusia untuk beragama Islam, meluruskan keislaman kaum muslim, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara intelektual, sosial, ekonomi maupun

politik. Pengelolaan organisasi dilakukan secara modern. Dikatakan modern karena proses regenerasi kepemimpinan berlaku secara berkesinambungan. Selain itu, tidak terjadi proses kultus individu, yang memandang pimpinan organisasi sebagai sosok individu yang paling sempurna.

Dalam AD-ART bab II pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah SWT, dalam usahanya untuk memurnikan pengamalan ajaran Islam (purifikasi) dan sekaligus mengangkat kehidupan umat.

Sangat terasa adanya keinginan besar dari warga Muhammadiyah untuk kembali melakukan revitalisasi perannya sebagai pembaru dalam membangun peradaban yang lebih baik.

Keinginan untuk melakukan revitalisasi pembaruan (*tajdid*) Muhammadiyah, tampaknya sangat wajar. Sebab selama ini ada semacam anggapan di sebagian pihak, termasuk warga Muhammadiyah sendiri, tentang kurang optimalnya Muhammadiyah untuk berperan dalam pembangunan peradaban dunia yang terus berubah. Memang Muhammadiyah sudah menampakkan peran yang signifikan untuk melakukan purifikasi (pemurnian) dalam bidang aqidah dan ibadah. Demikian juga amal usaha Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan semakin meluas dan kokoh.

Namun harus diakui pula kondisi rakyat Indonesia, yang tentu saja mayoritas Muslim, belum mengalami perubahan yang signifikan. Indonesia masih dililit berbagai persoalan besar seperti kemiskinan, kebodohan, tingginya tingkat kriminalitas, merajalelanya korupsi, dan problem-problem

lain. Wabah busung lapar dan kurang gizi di Indonesia yang terungkap baru-baru ini semakin memperjelas realita rakyat Indonesia.

Dari sinilah, kemudian muncul pertanyaan : dimana peran Muhammadiyah untuk merespons hal ini semua? Ada pertanyaan besar yang dengan hati yang lapang perlu kita pikirkan, kenapa keberhasilan Muhammadiyah dalam purifikasi aqidah dan ibadah termasuk keberhasilan amal usaha Muhammadiyah belum berdampak secara signifikan terhadap penyelesaian problem-problem aktual tadi?

Menurut Dadang Kahmad (PR;2004) peran Muhammadiyah dalam bidang amal usaha di berbagai lapangan kehidupan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun penyantunan kepada kaum *mustadaffin* dan pelayanan ibadah, difokuskan pada program-program yang mendukung pemerintah. Terutama dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80 pada 2010. Dengan pemerataan pendidikan dan meningkatkan indeks rata-rata lama sekolah.

Untuk bidang kesehatan kita akan terus menyebarkan balai pengobatan. Balai pengobatan yang sekarang ada sudah mencapai 56. Rencananya, setiap cabang akan punya satu balai pengobatan sehingga kita harus punya minimal 215 balai pengobatan yang posisinya berada di setiap cabang.

Dari segi ekonomi, pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian penting. Hal itu sudah mencuat dan dibicarakan sejak dalam musyawarah pimpinan (Muspim). Bagaimana caranya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai tuntutan Islam. Kita punya konsep dakwah jemaah.

Dakwah jemaah itu artinya, di setiap anggota ranting dibentuk kelompok-kelompok yang nantinya diberdayakan dari segi agama, kehidupan, dan keorganisasian.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini di deskripsikan bagaimana peranan lembaga keagamaan Pengurus Cabang Muhammadiyah Rancaekek menjalankan peranannya terhadap bidang-bidang sosial kemasyarakatan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Bahwa ciri-ciri metode deskriptif ialah suatu metode penelitian yang memusatkan diri pada pengumpulan data, mengelompokan data dan menganalisis data.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi ini mengingat lokasi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal penulis sehingga sangat memudahkan dalam penelitian lebih lanjut. Selain itu juga di tempat inilah penulis menemukan masalah dan cukup tersedianya data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a Sumber primer, yaitu sumber yang harus ada dan menjadi data yang harus di kumpulkan meliputi litelatur, dokumentasi dan hasil wawancara.
- b Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer, artinya apabila sumber data primer tidak ada atau kurang memadai, maka data sekunder melengkapinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis akan memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan sebagai berikut :

- a Teknik Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Melalui teknik ini penulis mengharapkan untuk memperoleh data secara tepat dan memperoleh informasi yang sifatnya langsung tanpa ada unsur kepura-puraan, ditutup-tutupi atau di tambah-tambah. Karena hal ini akan mempengaruhi kualitas penelitian.

- b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Teknik ini di pergunakan untuk mengangkat data serta fakta yang tidak tergali oleh teknik observasi. Karena itu, wawancara sebagai bentuk sekunder yang di lakukan terhadap, warga yang termasuk kedalam sumber data.

Wawancara yang dilakukan kepada (1) Bapak Cece Syahman Suparman S.pd selaku Sekretaris pada tanggal 19-07-07. (2) Bapak Drs. Ahmad Suhara selaku ketua majelis ekonomi pada tanggal 4-07-07. (3) Bapak Heli H. Tohar, S.Ag selaku ketua majelis Pendidikan Kader tanggal 9-07-07. (4) Bapak Dadang wahyudin S.Pdi selaku ketua majelis Tabligh dan Tarjih pada tanggal 7-07-07.

Wawancara tersebut dilakukan karena untuk memperoleh data yang konkrit dan aktual untuk penelitian dan dianggap sangat representatif. Proses wawancara langsung bertatap muka dengan para narasumber, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di pedoman wawancara (terlampir)

c. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah dan melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan memanfaatkan sumber informasi dan yang terdapat dalam buku-buku serta untuk menggali konsep dan teori dasar yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti, dengan demikian di harapkan dengan studi kepustakaan, akan lebih memiliki sebuah kesimpulan yang akurat. Dengan menggunakan buku-buku seperti; Azra, Azyumardi, 1995. *Muhammadiyah dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, dalam Ulumul Al-Quran*, Kelompok Studi Lingkaran, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Mizan, Bandung, 1995. Ma'arif, Ahmad, Syafi'i, 1995. *Muhammadiyah dan High Politik, dalam Ulumul Quran*, Mustofa Hasyim, *Beragama berhati nurani Membaca Isyarat K.H Ahmad*

Dahlan, Pustaka SM, Yogyakarta, 2000. Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Masyarakat Islam*, Gerbang Masyarakat Baru Press, Bandung, 2001

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber skunder; Sumber data primer diperoleh dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan data primer dari studi kepustakaan.
- b Mengklasifikasikan semua data dalam satuan-satuan masalah yang diteliti; data yang diperoleh identifikasi ke dalam rumusan masalah penelitian
- c Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; yaitu kondisi Muhammadiyah cabang Rancaekek bagaimana korelasinya dengan teori peranan
- d Menafsirkan dan menarik kesimpulan rumusan-rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku; setelah dilakukan analisa mengenai hasil penelitian maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut